

Implikasi Status Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Pada Regulasi Keuangan Negara

**Nurwidya Kusma Wardhani^{1*}, Taufiqurrohman Syahuri², Mas Pungky Hendra
Wijaya³**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia¹

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia³

Corresponding Email: widkusma@gmail.com*

Abstract

Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur membuat banyak sektor mengalami perubahan. Baik di sektor pemerintahan, sektor sosial, maupun sektor ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan berbagai sektor yang selama ini hanya berpusat di wilayah Pulau Jawa. Pemerataan tersebut hingga ke wilayah timur Indonesia memungkinkan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan ke wilayah timur Indonesia yang selama ini dianggap masih tertinggal dibandingkan wilayah barat Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 2022 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 akan dikaitkan dengan penetapan status pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. Penulis ingin menganalisis bagaimana implikasi status pemerintahan daerah khusus yang ada di IKN dengan sistem keuangan negara yang tentunya dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Metode penelitian yuridis normatif akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini akan berdampak pada keterkaitan antara penetapan pemerintahan daerah khusus dengan regulasi keuangan negara yang seharusnya dimiliki oleh Ibu Kota Negara di masa yang akan datang. Serta dapat menjadi pedoman untuk menjalankan keuangan yang baik di kawasan timur Indonesia.

Keywords: Ibu Kota Negara, Pemerintahan Khusus, Keuangan Negara

Implications of the Status of the Special Capital Region of the Nusantara on the State Financial Regulation

**Nurwidya Kusma Wardhani^{1*}, Taufiqurrohman Syahuri², Mas Pungky Hendra
Wijaya³**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia¹

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia³

Corresponding Email: widkusma@gmail.com*

Abstract

The relocation of the national capital from Jakarta to East Kalimantan has changed many sectors. Both in the government sector, social sector, and economic sector. This is done as a form of equalization of various sectors which have only been centered in the Java Island region. The equalization to the eastern region of Indonesia allows sustainable development to be carried out to the eastern region of Indonesia, which has been considered underdeveloped compared to the western region of Indonesia. Law No. 3 of 2022 and Law No. 17 of 2003 will be associated with the determination of the special regional government status of the National Capital. The author wants to analyze how the implications of the special regional government status in IKN with the state financial system are certainly associated with Law (UU) Number 21 of 2023 concerning Amendments to Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The normative juridical research method will be studied with a statutory approach, comparative approach and conceptual approach. The results of this study will have an impact on the relationship between the establishment of a special regional government and the state financial regulation that should be owned by the State Capital in the future. And can be a guideline for running good finance in eastern Indonesia.

Keywords: National Capital, Special Government, State Finance